

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kurikulum yang diberlakukan saat ini dalam sistem pendidikan Nasional di Indonesia adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang merupakan penyempurnaan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Peberlakuan KTSP didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, tetapi pelaksanaannya baru dimulai pada tahun pelajaran 2006/2007. Salah satu faktor yang melatarbelakangi lahirnya KTSP adalah adanya perubahan masyarakat, baik secara sosial, politik, ekonomi, maupun daya dukung lingkungan alam, baik pada tingkat lokal maupun global.¹ Untuk itu sebuah kurikulum harus bersifat *fleksible* dan *adaptable* terhadap perubahan. Dalam proses penyusunannya satuan pendidikan diberi ruang untuk menyesuaikan kurikulum dengan kondisi sekolah, lingkungan alam dan sosial ekonomi masyarakat, serta karakteristik peserta didik. Di sinilah terbuka kesempatan satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai dengan kebutuhannya. Meskipun demikian, pengembangan tersebut tetap harus berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan (SNP/PP No. 19 Tahun 2005), sehingga kemasan

¹ Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008)

kurikulum yang dikembangkan pada akhirnya akan bermuara pada visi, misi dan tujuan yang sama yang diikat oleh SNP.²

Secara depenitif pemaknaan kurikulum memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh para pakar sesuai dengan titik berat inti dan pandangan dari pakar yang bersangkutan. Misalnya Hilda Taba,³ memposisikan kurikulum pada keluasan cakupannya, terutama pada isi, metode dan tujuan, khususnya tujuan jangka panjang. Objek kajian dalam kurikulum tidak terlepas dari tujuan yang melandasi prinsip dasar dan falsafah yang digunakan, kualifikasi pendidik, kondisi subjek didik, materi yang akan diajarkan, buku teks, organisasi kurikulum, penjenjangan, metode, bimbingan dan penyuluhan, administrasi, prasarana, biaya, lingkungan, evaluasi, pengembangan dan tindak lanjut. Semuanya itu disusun direncanakan menjadi suatu proses yang dianamis-konstruktif menuju arah yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk mekanisme organik maupun dalam mekanisme sistematis.⁴

Ronald C Doll,⁵ mengutamakan kurikulum pada proses dan skop yang lebih luas, dari materi ke pengalaman, baik di rumah, sekolah maupun lingkungan masyarakat, bersama guru atau tidak, ada hubungannya dengan pelajaran ataupun tidak, termasuk upaya guru dan fasilitas sebagai pendukungnya. Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Butir 19 disebutkan bahwa

² E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah)*, (Bumi Akasara, Jakarta:2008), h. 2

³ Hilda Taba, *Curriculum Development: Theory and Practice*, (New York: John Wiley, 1967), h. 3

⁴ Syed Ali Ashraf, *Krisis Pendidikan Islām*, (Bandung: Risalah, 1986), h. 77

⁵ Ronald C. Doll, *Curriculum Improvement: Decition Making and Process*, (Boston: Allyn and Bacon, 1978), h. 22

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Pendapat-pendapat di atas mengindikasikan bahwa kurikulum adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan, tanpa kurikulum suatu sistem pendidikan belum dapat dikatakan sebagai sistem pendidikan yang sempurna, karena kurikulum merupakan ruh (*spirit*) yang menjadi gerak dinamik suatu sistem pendidikan. Kurikulum juga merupakan sebuah *elan vital* yang menjadi landasan bagi terselenggaranya pendidikan yang baik, bahkan kurikulum dijadikan tolak ukur bagi kualitas dan penyelenggaraan pendidikan. Baik buruknya kurikulum akan sangat menentukan terhadap baik buruknya kualitas output pendidikan, dalam hal ini kualitas peserta didik.

Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Madrasah Aliyah adalah salah satu kurikulum dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. PAI wajib diberikan pada semua jenjang pendidikan, mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Di dalam Undang-undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 37 Ayat 1, dinyatakan bahwa pendidikan agama bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Tujuan pendidikan agama seperti yang termuat dalam UU No 20/2003 tersebut, tidak dapat dicapai hanya sebatas memberikan pengajaran agama

dengan parameter keberhasilan diukur dari segi seberapa jauh peserta didik menguasai hal-hal yang bersifat kognitif atau pengetahuan tentang ajaran agama atau ritus-ritus keagamaan. Justru penekanan yang lebih penting adalah seberapa dalam tertanamnya nilai-nilai keagamaan dalam jiwa dan seberapa dalam pula nilai-nilai tersebut terwujud dalam tingkahlaku dan budi pekerti peserta didik sehari-hari.

Nilai-nilai keagamaan yang harus ditanamkan kepada peserta didik didasarkan kepada sumber utama ajaran Islâm (al-Qur`ân dan Hadîs). Berdasarkan kedua sumber itulah disusun bangunan keilmuan PAI yang dipelajari pada Madrasah Aliyah yang terdiri dari beberapa bidang studi yakni Qur`ân-Hadîs, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islâm.⁶ Secara normatif menurut Said Agil, bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam proses aktualisasi nilai-nilai Islâm dalam pendidikan, paling tidak meliputi tiga dimensi atau aspek kehidupan yang harus dibina dan dikembangkan dalam institusi pendidikan yakni: 1. dimensi spritual, yaitu iman, taqwa dan akhlak mulia. Dimensi spritual ini tersimpul dalam satu kata yaitu akhlak, karena akhlak merupakan alat kontrol psikis dan sosial bagi individu dan masyarakat; 2. dimensi budaya yaitu kepribadian yang mantap dan mandiri, tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dimensi ini menitikberatkan pada pembentukan kepribadian Muslim dengan berpedoman kepada nilai-nilai keislaman; 3. dimensi kecerdasan yang membawa kepada kemajuan yaitu

⁶ Abdul Rahman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi dan Aksi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 12. Lih juga. Abdurrahman Mas`ud, *Menggagas Format Pendidikan Non-Dikhotomik (Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islâm)*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 47

cerdas, kreatif, terampil, disiplin, etos kerja, *profesional*, *inopatif* dan *produktif*. Dimensi ini mencakup tiga proses yaitu *analisis*, *kreativitas* dan *praktis*.⁷

Pendapat Said Agil tentang proses aktualisasi nilai-nilai Islâm dalam pendidikan, yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah aktualisasi nilai-nilai Islâm dalam dimensi budaya. Salah satu nilai dalam dimensi budaya yang perlu dikembangkan dalam kurikulum pendidikan agama Islâm adalah nilai-nilai ajaran Islâm dalam aspek kemasyarakatan yakni bagaimana seharusnya seorang Muslim bersikap terhadap orang lain dalam satu komunitas yang tentu saja sangat beragam. Keragaman tersebut bisa dalam bentuk keragaman etnis, suku bangsa, bahasa, adat istiadat, budaya dan keragaman keyakinan. Masing-masing aspek dalam keragaman itu memiliki nilai-nilai tersendiri yang mungkin saja berbeda satu sama lain sehingga bisa saja menimbulkan konflik, sehingga diperlukan satu acuan untuk menghindari agar konflik tidak terjadi. Dalam konteks inilah perlunya pengembangan nilai multikultural.

Istilah multikultural secara etimologi berarti keragaman kultur atau budaya, yakni kompleksitas yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan atau kebiasaan-kebiasaan lain yang diperoleh anggota-anggota suatu masyarakat.⁸ Sedangkan dari pengertian terminologi bahwa multikulturalisme adalah kesediaan

⁷ Said Agil Husin al-Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur`ân Dalam Sistem Pendidikan Islam*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 7-9.

⁸ Deddy Mulyana, MA., dan Jalaludin Rakhmat, M.Sc., (ed), *Komunikasi Antarbudaya (Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 56.

menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, ataupun agama.⁹

Kesediaan menerima kelompok lain yang berbeda dalam lingkungan yang sama dan saling menguntungkan satu sama lain, merupakan pengakuan terhadap pluralisme kultural,¹⁰ serta menghargai dan berusaha melindungi keragaman tersebut,¹¹ mengusung semangat untuk hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan kultur yang ada, baik secara individual maupun secara kelompok dan masyarakat. Individu dalam hal ini dilihat sebagai refleksi dari kesatuan sosial dan budaya di mana mereka menjadi bagian darinya.¹² Oleh karena itu Multikulturalisme dapat dipandang sebagai landasan budaya bagi kewargaan, kewarganegaraan, dan pendidikan. Tentu saja multikulturalisme sebagai landasan budaya memiliki nilai-nilai yang berkaitan dengan kemanusiaan yang mencakup komitmen dan kohesi kemanusiaan melalui toleransi, saling menghormati hak-hak personal dan komunal.¹³

Pelaksanaan komitmen dan kohesi kemanusiaan dalam kerangka menjalin hubungan dan interaksi di dalam masyarakat, diperlukan kesadaran-kesadaran nilai dan kecakapan-kecakapan tertentu bagi setiap individu. Untuk

⁹ Scott Lash dan Mike Featherstone (ed.), *Recognition and Difference: Politics, Identity, Multiculture*, (London: Sage Publication, 2002), h. 2-6.

¹⁰ Everett M. Rongers, Thomas M. Steinfatt, *Intercultural Communication*, (Illinois: Waveland Press, Inc., 1999), h. 238

¹¹ Leo Suryadinata, "Indonesia State Policy toward Ethnic Chinese : From Asimilation to Multiculturalism", dalam. *Jurnal Antropologi Indonesia*, (Bali: Universitas Udayana, , 2002)

¹² Azyumardi Azra, "Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme", dalam. *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*. (Bogor: Brighten Press, 2006), h. 154. Juga. Parsudi Suparlan, *Sukubangsa dan Hubungan Antar Sukubangsa*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2005), h. 98.

¹³ Azyumardi Azra, "*Keragaman Suku, Agama, Ras, Gender sebagai Modal Sosial untuk Demokrasi dan Masyarakat Madani: Resiko, Tantangan dan Peluang*" Makalah disampaikan pada Semiloka Nasional Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Institute for Community Behavioral Change (ICBC) dan Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Yogyakarta, 13 Agustus, 2007.

itu diperlukan proses mengetahui, belajar, baik melalui pengalaman sehari-hari maupun melalui pendidikan formal, karena setiap proses mekanisme di dalam masyarakat merupakan proses timbalbalik yang disebut dengan *educative effects*¹⁴ atau hasil dari proses pendidikan.

Nilai-nilai utama dalam paham multikultural adalah *keadilan sosial, demokrasi, dan hak asasi manusia*,¹⁵ pengurangan prasangka (*prejudice reduction*) yang lahir dari interaksi antar keragaman dalam kultur pendidikan, dan kesetaraan manusia (*equity pedagogy*) yang memberi ruang dan kesempatan yang sama kepada setiap element yang beragam.¹⁶ Pertanyaan yang perlu diajukan adalah apa faktor-faktor yang melatarbelakangi sehingga nilai-nilai multikultural perlu dikembangkan dalam kurikulum PAI madrasah Aliyah ?

Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat dirujuk kepada ajaran Islam itu sendiri. Ajaran Islâm dapat dikelompokkan kepada dua prinsip yaitu ajaran yang bersifat absolut, kekal, tidak berubah dan tidak diubah, yang jumlahnya sangat sedikit, seperti yang terdapat dalam al-Qur`ân dan ajaran yang bersifat relatif, tidak kekal, dapat berubah-ubah dan diubah, yang jumlahnya sangat banyak, seperti yang terdapat di dalam keilmuan Islam (mis. dalam bidang teologi dan fiqh). Nabi Muhammad pada masanya telah mengaplikasikan ajaran-ajaran Islâm, sehingga mampu merubah masyarakat Arab jahiliyyah,

¹⁴ Muhammad Noor Syam, *Filsafat Kependidikan dan Dasar Filsafat Kependidikan Pancasila*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), h. 196

¹⁵ H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan*, (Magelang: Indonesia Tera, 2003), h. 167.

¹⁶ James A. Banks & Cheery A Banks, *Multicultural Education Issues and Perspectives*, (United States of America: John Wiley & Sons Inc, 2009), h. 3-24.

baik secara moral, ekonomi, politik, maupun religius ke arah masyarakat agamis.¹⁷ Adanya ajaran Islām yang berifat relatif tersebut menurut Harun Nasution, karena masyarakat bersifat dinamis, masyarakat senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan mengikuti peredaran zaman, demikian juga peraturan dan hukum mempunyai efek yang mengikat. Kalau peraturan dan hukum absolut dalam jumlah yang banyak dan rinci, maka perkembangan masyarakat dapat menjadi terhambat.¹⁸ Dalam konteks inilah munculnya berbagai varian Islam seperti yang terdapat dalam *teologi Islām, Fikih, tasawuf, dan sebagainya*.¹⁹ Misalnya dalam bidang teologi Islām terdapat aliran mu'tazilah dan Asy'ariyah, yang mempunyai pola yang berbeda dalam memahami ajaran Islam, aliran Mu'tazilah lebih rasional dan aliran Asy'ariyah lebih tekstual; di dalam bidang fiqh terdapat pula dua aliran yakni *ahl al-ra'y* dan *ahl al-hadîs*; kemudian dalam bidang tasawuf terdapat pula tasawuf akhlak

¹⁷Harun Nasution, *Islām Rasional*, (Bandung : Mizan, 1995), h. 28. Karakteristik al-Qur`ân yang singkat dalam mengemukakan sesuatu, yang hanya memuat pokok-pokok dan prinsip-prinsip dasar sebagai petunjuk, bukan sesuatu yang kebetulan, melainkan merupakan kebijaksanaan Ilahi yang amat menguntungkan bagi umat manusia yang selalu berkembang. Seandainya al-Qur`ân merinci segala sesuatu justeru akan menimbulkan kesulitan karena tidak ada ruang gerak bagi perkembangan yang selalu terjadi dalam kehidupan manusia yang bersifat dinamis. Justru pada sifat al-Qur`ân yang singkat tersebut terletak kelayakan al-Qur`ân untuk selalu relevan dengan setiap perkembangan.

¹⁸Harun Nasution, "Islām" *Ibid.*, h. 28. Karakteristik al-Qur`ân yang singkat dalam mengemukakan sesuatu, yang hanya memuat pokok-pokok dan prinsip-prinsip dasar sebagai petunjuk, bukan sesuatu yang kebetulan, melainkan merupakan kebijaksanaan Ilahi yang amat menguntungkan bagi umat manusia yang selalu berkembang. Seandainya al-Qur`ân merinci segala sesuatu justeru akan menimbulkan kesulitan karena tidak ada ruang gerak bagi perkembangan yang selalu terjadi dalam kehidupan manusia yang bersifat dinamis. Justru pada sifat al-Qur`ân yang singkat tersebut terletak kelayakan al-Qur`ân untuk selalu relevan dengan setiap perkembangan.

¹⁹Harun Nasution dan Azyumardi Azra (eds), *Perkembangan Modern Dalam Islām*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), h. 9. Ajaran Islām yang relatif dan berubah-ubah tersebut, merupakan hasil ijtihad ulama yang dalam perjalanan sejarahnya dianggap pula mempunyai kebenaran yang absolut. Hal ini menimbulkan dogmatisme ketat, pandangan sempit, dan ketidakterbukaan terhadap hal-hal baru. Perubahan-perubahan yang dibawa oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dianggap tidak sejalan dan bahkan bertentangan dengan ajaran agama. Rasa puas dan anggapan absolut terhadap apa yang dihasilkan oleh para ulama klasik, menyebabkan kaum muslimin tidak berani untuk melakukan ijtihad.

dan tasawuf filosofis. Tetapi tidak jarang perbedaan-perbedaan pendapat di antara varian-varian Islam itu menimbulkan petentangan antara satu dengan yang lain.

Sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai ciri khas Islam, madrasah memegang peran penting dalam proses pembentukan kepribadian anak didik, karena melalui pendidikan madrasah ini para orang tua berharap agar anak-anaknya memiliki dua kemampuan sekaligus, tidak hanya pengetahuan umum (IPTEK) tetapi juga memiliki kepribadian dan komitmen yang tinggi terhadap agamanya (IMTAQ). Oleh sebab itu jika kita memahami benar harapan orang tua ini maka sebenarnya madrasah memiliki prospek yang cerah. Di sisi lain, jika dilihat dari kesejarahannya, madrasah memiliki akar budaya yang kuat di tengah-tengah masyarakat, sebab itu madrasah sudah menjadi milik masyarakat. Apabila dewasa ini banyak ahli berbicara tentang inovasi pendidikan nasional untuk melahirkan pendidikan yang dikelola masyarakat (*community based management*), maka madrasah dan termasuk juga pesantren merupakan model dari pendidikan tersebut.

Sesuai dengan perkembangan masyarakat akhir-akhir ini yang menginginkan model pendidikan iptek sekaligus agama, maka pendidikan yang akan dipilih oleh masyarakat adalah pendidikan yang dapat memberikan kemampuan secara teknologis, fungsional, individual, informatif dan terbuka. Dan yang lebih penting lagi, kemampuan secara etik dan moral yang dapat dikembangkan melalui agama. Kesan marginalitas madrasah, sebenarnya lebih banyak disebabkan karena sebagian besar madrasah lebih berorientasi pada

kerakyatan (populis), pendidikan hanya dijadikan sebagai fungsi “cagar budaya” dan pada saat bersamaan ia mengabaikan kualitas dan prestasi, sebab itu penyelenggaraan pendidikan cenderung dilakukan secara konvensional, apa adanya, manajemen non-profesional, stagnan dan status quo, dan pada akhirnya pendidikan semacam ini ditinggalkan oleh masyarakat dan hanya diminati kelompok masyarakat bawah.

Akan tetapi dewasa ini persepsi atau pemahaman masyarakat tentang madrasah sudah mengalami pergeseran sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi secara makro yang dilakukan pemerintah dengan kebijakan-kebijakan barunya. Pada awalnya madrasah dipahami sebagai sekolah yang hanya mengajarkan agama tetapi sekarang ini persepsi masyarakat sudah berubah bahwa ternyata madrasah pada dasarnya sama dengan sekolah umum lainnya karena memiliki kurikulum yang sama, di sisi lain madrasah dianggap sebagai sekolah umum plus agama. Perubahan persepsi dan pemahaman tersebut seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi secara makro, madrasah dianggap sebagai sekolah agama ketika kurikulum madrasah masih berbanding 70% agama dan 30% umum, tetapi ketika terjadi perubahan dimana madrasah adalah sekolah umum yang berciri khas Islam yang memiliki kurikulum sama dengan sekolah umum dan memiliki kelebihan yakni “identitas keIslaman”, maka madrasah kemudian dianggap sebagai sekolah umum plus yang memiliki nilai lebih dibanding dengan sekolah umum.²⁰

²⁰ Lih. Malik Fadjar, *Tantangan dan peran umat Islam dalam menyongsong abad xxi*, (Surabaya, Makalah IAIN Sunan Ampel, 1995)

Jika dilihat dari kecenderungan atau gejala sosial baru yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini yang berimplikasi pada tuntutan dan harapan tentang model pendidikan yang mereka harapkan, maka sebenarnya madrasah memiliki potensi dan peluang besar untuk menjadi alternatif pendidikan masa depan. munculnya kesadaran baru dalam beragama (santrinisasi), terutama pada masyarakat perkotaan kelompok masyarakat menengah atas, sebagai akibat dari proses re-Islamisasi yang dilakukan secara intens oleh organisasi-organisasi keagamaan, lembaga-lembaga dakwah atau yang dilakukan secara perorangan. Terjadinya santrinisasi masyarakat elit tersebut akan berimplikasi pada tuntutan dan harapan akan pendidikan yang mengaspirasikan status sosial dan keagamaannya. Sebab itu pemilihan lembaga pendidikan didasarkan minimal pada dua hal tersebut, yakni status sosial dan agama.

Madrasah pada masa yang akan datang diharapkan mampu mengatasi terutama persoalan-persoalan perpecahan intern umat Islam khususnya masyarakat Indonesia yang majemuk dan hampir 85 % penduduknya adalah Muslim.

Berdasarkan bukti sejarah bahwa sejak wafatnya Rasulullah, telah mulai muncul perpecahan di kalangan kaum Muslim terutama antara golongan Muhajirin dan golongan Anshar tentang siapa yang menjadi pemimpin kaum Muslim sebagai pengganti Rasulullah, masing-masing kelompok merasa lebih berhak sebagai pengganti Rasulullah. Persoalan tersebut dapat diselesaikan setelah disepakati mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah.

Masalah khilafah atau imamah merupakan persoalan politik yang telah menjadi sumber utama perpecahan umat Islâm yang terbesar, yang dalam ungkapan Syahrastani, bahwa tidak pernah “pedang dihunus” oleh kaum Muslim dengan alasan agama sebagaimana dihunus karena alasan imamah pada setiap zaman.²¹ Terbunuhnya Usman bin Affan sebagai khalifah ketiga pada tahun 35 H, menjadi titik tolak bagi perpecahan kaum Muslim.²² Situasi yang mengiringi kematian Usman, adalah terjadinya perang pertama antara sesama Muslim yakni perang Jamal yang terjadi pada tahun 36H antara kelompok yang dipimpin oleh Aisyah r.a, isteri Rasul saw, yang menuntut bela atas kematian Usman, dengan kelompok Ali bin Abi Talib yang diangkat menjadi khalifah sesudah Usman. Masalah ini dikenal dalam sejarah Islâm sebagai *al-Fitnah al-Kubra* (bencana besar) di kalangan kaum Muslim. Peristiwa itu telah menyebabkan kaum Muslim terpecah kepada tiga kelompok yakni kelompok Ali, kelompok Muawiyah, dan kelompok moderat/neutral yang tidak memihak kepada salah satu dari dua kelompok tersebut.²³

Pertentangan antara kelompok Muawiyah dan Ali membawa kepada terjadinya perang *Siffin* pada tahun 37 H/657 M. Perang ini diakhiri dengan pelaksanaan tahkim (*arbitrase*), tetapi perundingan antara kedua belah pihak tidak berjalan dengan jujur. Amru bin Ash sebagai wakil kelompok Muawiyah membuat kelicikan terhadap Abu Musa sebagai wakil Ali bin Abi Tahlîb.

²¹ Al-Imam Abu Al-Fath Muhammad bin Abd al-Karim Al-Syahrastani, *Al-Milal Wa Al-Nihal*, j.1, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t.th), h.13.

²² Al-Imam Abdul Qadir bin Tahir bin Muhammad Al-Baghdadi, *al-Farq Bayn Al-Firq*, (Beirut: Dar al-Marifah, 1997), h. 24.

²³ Al-Syahrastani (t.th.),”*al-Milal*” *op. cit.*, hal 136-137.

dengan menetapkan Muawiyah sebagai khalifah umat Islam walaupun kelompok Ali tidak puas.

Peristiwa tahkim bukan saja tidak menyelesaikan konflik, malahan menjadi awal konflik yang berkepanjangan sampai hari ini. Kelompok Ali sendiri terpecah menjadi dua yakni yang tetap setia kepadanya (belakang hari disebut syi'ah) dan kelompok yang keluar dari kelompok Ali serta berbalik menjadi musuhnya, yang disebut Khawarij dengan slogan *La hukma illa lillâh* (Tidak ada hukum atau keputusan melainkan bagi Allah semata).²⁴ Dari sinilah mulai munculnya aliran-aliran kalam di dunia Islam yang masing-masing aliran mempunyai pandangan yang berbeda-beda.²⁵

Keadaan kaum Muslim di Indonesia juga tidak jauh berbeda dengan apa telah diuraikan di atas, apalagi Indonesia merupakan negara yang memiliki realitas plural atau kemajemukan (*multikultural*),²⁶ yang sangat mencolok dan hanya terdapat beberapa wilayah lain di dunia yang memiliki pluralitas kultural

²⁴ Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1996), h. 58; Ahmad Muhammad Ahmad Jilli, *Dirasah An al-Firqah Fi Tarikh al-Muslimin: al-Khawarij Wa al-Syiah*, (Riyadh: King Faisal Centre For Research and Islamic Studies, 1988), h. 48; Al-Syahrastani (t.th), *Ibid.*, hal. 106; Mustafa Muhammad Asy Syakah, *Islam Tidak Bermazhab*, terj. A.M. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 103; Ali Abd al-Fattah al-Maghribi, *al-Firqah al-Kalamiyyah al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), h. 170; Syed Ameer Ali, *Api Islam*, terj. H.B. Jassin, (Jakarta: P.T. Pembangunan, 1967), h. 162

²⁵ Perbedaan pendapat pada awal munculnya aliran kalam adalah tentang *iman*, *dosa besar* dan *kafir* yang berawal dari peristiwa tahkim. Menurut golongan khawarij, Ali dan Mu'awiyah beserta para pendukungnya telah melakukan tahkim kepada manusia, berarti mereka telah berbuat dosa besar dan telah menjadi kafir. Aliran Murji'ah berpendapat bahwa orang yang berdosa besar tetap mukmin, bukan kafir. Adapun dosa yang dilakukannya terserah kepada Allah untuk diampuni atau tidak. Sedangkan dalam pandangan Mu'tazilah, setiap pelaku dosa besar, berada di posisi tengah di antara posisi mukmin dan posisi kafir (*al-manzilah bain manzilatain*). Jika pelakunya meninggal dunia dan belum sempat bertaubat, ia akan di masukkan ke dalam neraka selama-lamanya.

²⁶ Indonesia melebihi kebanyakan negara-negara lain, merupakan negara yang tidak saja *multi-suku*, *multi-etnik*, *multi-agama*, tetapi juga *multi-budaya*. Di Indonesia terdapat 250 kelompok suku, 250 lebih bahasa lokal (*lingua franca*), 13.000 pulau, dan 5 agama resmi. Lih. Leo Suryadinata, dkk., *Indonesian Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003), h. 30, 71, 104, dan 179.

seperti itu.²⁷ Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari dua sisi yakni secara horizontal dan vertikal. Kemajemukan secara horizontal²⁸ ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan; dan secara vertikal²⁹ ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.³⁰

Kekerasan dan konflik horizontal yang sering terjadi telah menguras energi dan merugikan tidak saja jiwa dan materi, tetapi juga mengorbankan keharmonisan antar sesama masyarakat Indonesia. Misalnya kekerasan yang terjadi di Propinsi Aceh yang sudah berangsur sejak lebih dari 30 tahun yang lalu, dan telah banyak warga Aceh menjadi korban kekerasan itu. Sewaktu muncul pemberontakan DI/TII, yang berlangsung antara 1953-1964, sekitar 4000 warga Aceh terbunuh. Menyusul kemudian berdirinya gerakan Aceh Merdeka (GAM) tahun 1976, yang diproklamirkan oleh Teuku Hasan Tiro. Gerilyawan GAM semakin banyak jumlahnya, termasuk masyarakat simpatisan atas gerakan tersebut semakin besar jumlahnya. Mereka secara terus-menerus berhadapan dengan pasukan keamanan (TNI), sehingga banyak

²⁷ Robert W Hefner, *The Politics of Multiculturalism, Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia*, (Honolulu: Universitas of Hawai` Press, 2001), h. 4.

²⁸ Keragaman secara horizontal dalam bentuk keragaman dari berbagai aspek sosial budaya seperti keragaman dalam tatacara kehidupan, bahasa yang digunakan, seni budaya atau tradisi yang dimiliki. Dalam interaksi antara anggota masyarakat, jika tidak diimbangi dengan sikap toleransi atau empati akan menimbulkan gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan konflik horizontal

²⁹ Keragaman secara vertikal adalah kecenderungan terjadinya polarisasi secara ekonomi yang semakin jelas. Sebahagian anggota masyarakat yang kaya yang ditandai dengan banyaknya jumlah kepemilikan barang, dijadikan simbol status sosial lapisan atas. Sebahagian anggota masyarakat yang miskin semakin tidak dapat mengakses fasilitas hidup dasar yang dibutuhkan seperti tempat tinggal yang layak, pendidikan yang memadai maupun fasilitas kesehatan.

³⁰ Lih. Nasikun, *sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 30

korban dari kalangan masyarakat, di antaranya adalah pemuka masyarakat seperti Rektor IAIN Ar Raniry, Rektor UNSIAH, anggota DPR, dan lain-lain, serta kalangan masyarakat sipil. Korban lainnya adalah dalam bentuk hancurnya infrastruktur, berupa pembakaran sekolah, gedung perkantoran dan sebagainya yang tak terhitung jumlahnya. Diberlakukannya DOM (Daerah Operasi Militer) tahun 1990 yang semula dimaksudkan untuk memulihkan keamanan tidak berhasil, justru mengakibatkan lebih banyak korban penduduk sipil, termasuk anak-anak dan wanita. Sebagian mereka terbunuh dan sebagian lain terusir. Sampai dengan tahun 1995-an saja diperkirakan sebanyak 2000 orang dieksekusi tanpa pengadilan. Antara tahun 1991–1995 sekitar 5000 warga menjadi pengungsi, dan mulai Januari 1999, sudah puluhan ribu jiwa yang meninggalkan Aceh untuk mencari tempat aman.³¹ Mereka terusir, bukan oleh bangsa lain dan bukan oleh kelompok lain yang berbeda agama tetapi oleh bangsa sendiri dan saudara seagama.

Contoh lain adalah tragedi Sampit yang terjadi mulai tanggal 18 Februari 2001, yakni ketika orang Dayak memusuhi orang-orang Madura yang merupakan warga pendatang di Sampit. Tidak kurang dari lima ratusan warga Madura mati terbunuh secara mengerikan, lebih dari 5000 jiwa melarikan, sebagian lagi kembali ke tanah asalnya, Madura, padahal mereka sudah tak lagi punya saudara dan tanah warisan karena sejak kecil lahir di Sampit, sementara rumah-rumah mereka dibakar, termasuk gedung-gedung lain yang diidentifikasi milik orang Madura. Orang-orang Madura nyaris tidak

³¹ Lih. Isma Sawitri dkk., *Simak dan Selamatkan Aceh*, Panitia Peduli Aceh, 1999, h. 42-

menyisakan apapun ketika harus terusir dari negerinya sendiri. Mereka yang menjadi korban adalah orang-orang awam, termasuk wanita dan anak-anak, yang tidak tahu politik, tidak tahu apa dosa kenapa orang tuanya dibunuh, dan tidak mengerti kemana harus pergi. Mereka yang membunuh adalah orang-orang yang sesama warga bangsa dan sesama saudara seagama. Banyak pengamat memberikan analisis tentang tragedi Sampit, sebahagiannya ada yang melihat dari segi kecemburuan sosial-ekonomi, karena warga Madura secara ekonomi lebih maju dan nyaris menguasai perekonomian Sampit, dan ada yang mengemukakan soal gerakan Borneo Merdeka dan sebagainya.³²

Semua perkiraan dan asumsi itu boleh jadi benar semua, atau sebagian saja yang benar, namun yang lebih penting adalah bahwa mereka yang diusir atau dibunuh dengan mereka yang mengusir atau membunuh, adalah sesama warga satu agama, yakni Islam. Persamaan agama, ternyata tidak menjamin adanya persamaan sikap menahan diri ketika menghadapi perbedaan kepentingan atau perbedaan pendapat. Persaudaraan dalam satu iman nampaknya sulit terwujud. Seandainya benar ada alasan lain yang mendorong terjadinya kekerasan itu, baik masalah politik, ekonomi, masalah budaya atau sosial, berarti persamaan agama dikalahkan oleh kepentingan lain, dalam hal persaduaaran.

Kedua kasus itu cukup representatif diungkapkan mewakili kasus-kasus konflik lain yang merupakan kasus perpecahan di kalangan kaum Muslim di berbagai daerah di Indonesia. Berbagai upaya rekonsiliasi telah dilakukan, dan

³² Lih. Drs. Hamdan M Si Ibnu Hasan Muchtar, Lc, *Tragedi Sampit*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, 2001), h. 6

sementara mampu meredam terjadinya tindak kekerasan yang lebih luas. Namun hingga kini tak ada yang bisa meramalkan, akankah tindak kekerasan itu berhenti, akankah kesatuan dalam agama, bisa dijamin berkehidupan yang damai dan harmonis di masa mendatang.

Solusi melalui temu lintas tokoh masyarakat serta bantuan dari pihak keamanan telah diupayakan, tetapi konflik tetap saja terjadi berulang-ulang. Umumnya konflik terjadi akibat distribusi baik ekonomi, sosial dan politik yang dianggap tidak adil bertepatan dengan perbedaan identitas. Penguasaan berbagai sumber daya ekonomi dan perilaku sosial suatu kelompok yang cenderung eksklusif semakin menegaskan komunitas etnisnya. Ketika terjadi gesekan-gesekan sosial meskipun kecil, akan memicu konflik yang massif dan berkepanjangan.³³

Selain konflik tersebut, di kalangan kaum Muslim di Indonesia juga terdapat berbagai perbedaan pandangan keagamaan di antara berbagai kelompok atau organisasi keagamaan, misalnya organisasi sosial keagamaan kelompok modernis yang diwakili Muhammadiyah dan Persis, dan kelompok tradisional yang diwakili oleh NU, yang melahirkan dinamika dan wacana yang saling berbeda dalam banyak bidang, baik bidang sosial keagamaan maupun bidang politik. Di bidang keagamaan terjadi beberapa perdebatan yang disebabkan karena hampir semua ajaran keagamaan kalangan modernis berbeda dengan ajaran keagamaan kalangan tradisional. Kaum modernis dalam persoalan ideologis berusaha memberantas unsur-unsur lokal dalam kehidupan

³³ Lih. Parsudi Suparlan, *Kemajemukan, Hipotesis Kebudayaan Dominan dan Kesukubangsaan*, (Jakarta: Jurnal Antropologi Indonesia, Th XXIII, No. 58, Januari-April, 1999).

keagamaan karena dianggap bid'ah (bukan ajaran asli Islam) sementara kaum tradisional mempertahankannya.³⁴

Kritik paling awal terhadap kelompok tradisional adalah tentang niat dan pelafatan *ushalli* ketika akan memulai shalat, kemudian kritik berkembang ke amalan-amalan kaum tradisional lainnya seperti tahlil, slametan, dan ziarah.³⁵ Kritik ini berlanjut ke masalah fiqih terutama masalah taqlid.³⁶ dan masalah keharusan atau tidak bermazhab. Gambaran konflik antara kelompok tradisional dan modernis ini dipaparkan oleh Geertz dalam penelitiannya di Mojokuto tahun 1950-an, bahwa terjadi pertentangan antara kedua kelompok tersebut sehingga orang NU tidak mau satu masjid dengan orang Muhammadiyah, bahkan membuka kitab Muhammad Abduh dianggap sebagai dosa besar.³⁷ Konflik politik antara kelompok modernis Islam yang diwakili Muhammadiyah dan kelompok tradisionalisme Islam yang diwakili oleh NU pernah pula terjadi pada masa orde baru yang mencapai puncaknya di era kepemimpinan H.J. Naro menjadi Ketua PPP sejak tahun 1978, yang banyak menyingkirkan tokoh NU di jajaran pengurus partai serta pengurangan peran orang-orang NU pada Pemilu tahun 1982, yang berakhir dengan keluarnya NU dari PPP dan kembali

³⁴ Martin van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, dan Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKIS, 2008), h. 19. Akar gerakan fundamentalis yang berbentuk purifikasi di Indonesia dapat dilacak pada awal abad ke-19 di Minangkabau yaitu ketika sekelompok pemuka Islam pulang dari Makkah dan membentuk Dewan Harimau nan Salapan atau Dewan Tuanku Nan Salapan yang menjelma menjadi gerakan Padri yang melakukan usaha pemurnian Islam menurut ide dan cara kaum Wahabiyah di Saudi Arabia. Lih. Burhanuddin Daya, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatera Thawalib*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), h. 50.

³⁵ Martin Van Bruinessen, *Ibid.*, h. 19-20.

³⁶ *Ibid.*, h. 20. Juga Syafiq A. Mughni, A. Hassan Bandung *Pemikir Islam Radikal*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), h. 97

³⁷ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam masyarakat Jawa*, ter. Aswab mahasin, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989), h. 190.

ke khittah 1926 melalui Mukhtamar ke-27 di Situbondo Jawa Timur pada tahun 1984.³⁸

Akhir-akhir ini muncul perlawanan dari sekelompok kaum Muslim yang mempunyai pemahaman lebih tekstual tentang Islâm yang kemudian dikenal dengan kelompok fundamentalis, sebagai respon terhadap semakin maraknya pemikiran Islâm Liberal. Secara umum, cita-cita dan orientasi gerakan Islâm fundamental adalah untuk mendapatkan kembali *The Golden Age of Islam* melalui tahapan-tahapan gerakan Islam global, agar bisa mengadakan suatu revolusi Islâm (*Islamic revolution*), dan akhirnya dapat menciptakan negara Islam (*Islamic state*).³⁹ Gerakan-gerakan tersebut seperti munculnya Lasykar Jihad Ahlu al-Sunnah meskipun berdirinya organisasi ini dilatar belakangi oleh konflik di Ambon, tetapi orientasi perjuangan kelompok ini mengembangkan aliran Wahabi di Indonesia yang dianggap sebagai gerakan Salafi. Laskar Jihad diresmikan pada 14 Februari 1998 dengan panglimanya Dja'far Umar Thalib. Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang dideklarasikan pada tanggal 7 Agustus 2008 sebagai kesimpulan dari kongres MMI di Yogyakarta yang menetapkan Abu Bakar Ba'asyir sebagai Amir Mujahidin. Selain itu terdapat gerakan yang berkonsentrasi untuk mengorganisir generasi muda antara lain, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi yang mengusung khilafah Islamiyah ini masuk ke Indonesia sekitar tahun 1980-an oleh seorang muballigh dari Yordania berkebangsaan

³⁸ Ali Anwar, *Avonturisme NU: Menjajaki Akar Konflik Kepentingan Politik Kaum Nahdhiyyin*, (Bandung: Humaniora, 2004), h. 57.

³⁹ M. Zaki Mubarak, *Geneologi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan Pemikiran dan Prospek Demokrasi*, (Jakarta:LP3ES, 2007), h. 116-132

Australia bernama Abdurrahman al-Baghdadi yang pernah diundang oleh KH. Abdullah bin Nuh pimpinan Pondok Pesantren al-Ghazali Bogor. HTI lebih memfokuskan perjuangan di kampus-kampus di seluruh Indonesia. KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), dan HAMMAS (Himpunan Aksi Mahasiswa Muslim antar Kampus).

Bentrokan yang paling aktual adalah antara massa Front Pembela Islam (FPI) dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), yang terjadi hari Minggu 1 Juni 2008 di silang Monas Jakarta karena pembelaan Aliansi ini atas berbagai hal, di antaranya soal Ahmadiyah.⁴⁰ Juga bulan oktober 2012 FPI juga telah menyerang masjid Ahmadiyah di Bandung. Massa dari Front Pembela Islam (FPI) juga melakukan penyerangan terhadap masjid Ahmadiyah di Tasikmalaya, Jawa Barat hari ini pada April 2013.

Konflik bernuansa SARA juga pernah terjadi antara kelompok Islâm Syi`ah dengan kelompok Islâm Sunni di Sampang, Madura yang bermula dari konflik pribadi antara pimpinan Islâm Syi`ah Tajul Muluk dengan saudaranya KH Rois yang beraliran Sunni. Dari konflik keluarga meluas menjadi konflik SARA setelah di kalangan pengikut Islâm Sunni tersiar kabar bahwa aliran Islâm Syi`ah merupakan aliran Islâm sesat, sehingga pengikut Islâm Sunni mengusir pengikut Syi`ah yang ada di wilayah Kecamatan Omben dan Kecamatan Karangpenang. Puncaknya terjadi pada 29 Desember 2011 berupa pembakaran rumah, madrasah, mushalla dan pesantren kelompok Islâm Syi`ah.

⁴⁰ Achmad Setiyadi, *Tragedi Monas Berdarah*, (Bandung: Semesta Investigation, 2008).

Konflik ini sudah terjadi sejak 2006, namun hingga kini belum bisa diredam hingga akhirnya terjadi aksi anarkis berupa pembakaran.

Konflik sosial, diskriminasi, konflik agama, krisis politik, ekonomi, budaya dan pendidikan, semakin sering terjadi.⁴¹ Dengan kehadiran agama, fenomena kehidupan dapat diberikan makna dan arti moral serta transendental, sehingga memiliki nilai tersendiri. Sedangkan agama dalam bentuk sistem struktur atau sistem ajaran dan aturan, berfungsi menegakkan norma-norma sosial, aturan-aturan, pemenuhan kebutuhan spritual manusia dengan Tuhannya.⁴² Akan tetapi bagaimana agama dapat menjadi solusi agar konflik-konflik, baik secara horizontal maupun vertikal tidak terjadi ?

Salah satu jalan untuk mengatasi konflik dan menciptakan perdamaian dan kasih sayang antar sesama, adalah melalui pendidikan,⁴³ karena pendidikan pada umumnya ditujukan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tertentu, yakni nilai-nilai atau norma-norma yang dijunjung tinggi oleh suatu lembaga pendidikan.⁴⁴ Konsep *rahmatan lil `âlamîn* dalam ajaran Islâm dapat dijadikan landasan kultural untuk menjalankan misi kemanusiaannya. Ajaran Islâm memiliki instrumen yaitu meletakkan pendidikan pada barisan terdepan, karena pendidikan yang secara langsung berhadapan dengan umat manusia.⁴⁵ Karena lingkungan belajarnya adalah masyarakat yang pluralistik, maka

⁴¹Lih. Parsudi Suparlan, "Kemajemukan" *op.cit*

⁴² Lih. Imam Sukardi (et.al), *Pilar Islam Bagi Pluralisme Modern*, (Solo: Tiga Serangkai, 2003), h. 24.

⁴³ Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory* (Cambridge: Harvard University Press, 2002)., h. 224-225.

⁴⁴ HA. Saifullah, *Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan: Pendidikan Sebagai Gejala Kebudayaan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h. 53-54.

⁴⁵ Abuddin Nata, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Jakarta: Grasindo, 2001), h. 100.

pembaharuan dan mengembangkan kurikulumnya pendidikan Islâm juga harus berbasis keanekaragaman dengan menampilkan wajah Islâm yang toleran.

Upaya membangun PAI berwawasan global yang ditandai dengan keragaman budaya dan agama itu memang sulit, karena pada waktu bersamaan pendidikan Islâm harus memiliki kewajiban untuk melestarikan, menanamkan nilai-nilai ajaran Islâm, dan dipihak lain berusaha untuk menanamkan karakter budaya nasional Indonesia dan budaya global. Tetapi upaya untuk membangun pendidikan Islâm yang berwawasan global dan keragaman agama itu tentu dapat diusahakan dengan langkah-langkah yang terencana dan strategis.⁴⁶

Saat ini menurut Amin Abdullah,⁴⁷ masih terdapat beberapa kendala dalam pembelajaran PAI di sekolah, yaitu:

1. pendidikan agama lebih banyak terkonsentrasi pada persoalan-persoalan teoritis keagamaan yang bersifat kognitif semata serta amalan-amalan ibadah praktis;
2. pendidikan agama kurang *concern* terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi “makna” dan “nilai” yang perlu diinternalisasikan dalam diri anak didik lewat berbagai cara, media dan forum;

⁴⁶ Fasli Jalal, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Adicita, 2001), h.6. Kurikulum dan materi pendidikan Agama Islam bagaimanapun tidak dapat terlepas dari dimensi perkembangan dan nilai-nilai pendidikan multikultural. Adapun komponen yang termasuk dalam kurikulum pendidikan multikultural antara lain tentang studi etnis, kelompok minoritas, gender, kesadaran kultur, hubungan antar sesama manusia, dan pengklarifikasian nilai-nilai dalam suatu kebudayaan. Hal-hal tersebut termasuk pula mengenai konsep rasisme, perbedaan jenis kelamin, keadilan, diskriminasi, opresi, perbedaan dan semacamnya

⁴⁷ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 65.

3. isu kenakalan remaja, perkelahian di antara pelajar, tindak kekerasan, premanisme, *white color crime*, konsumsi miras, dan sebagainya, walaupun tidak secara langsung, memiliki kaitan dengan metodologi pendidikan agama yang selama ini berjalan secara konvensional-tradisional;
4. metodologi pendidikan agama tidak kunjung berubah antara *pra* dan *post* era modernitas;
5. pendidikan agama lebih menitikberatkan pada aspek korespondensi-tekstual, yang lebih menekankan hafalan teks-teks keagamaan yang sudah ada;
6. dalam sistem evaluasi, bentuk-bentuk soal ujian agama Islâm menunjukkan prioritas utama pada kognitif dan jarang pertanyaan tersebut mempunyai bobot muatan “nilai” dan “makna” spiritual keagamaan yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kedudukannya yang strategis, kurikulum memiliki fungsi holistik dalam dunia pendidikan. Ia memiliki peran dan fungsi sebagai wahana dan media *konservasi*, *internalisasi*, *kristalisasi* dan *transformasi* ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan nilai-nilai kehidupan ummat manusia. Oleh karena itu kurikulum pendidikan agama Islâm perlu segera menampilkan ajaran-ajaran Islâm yang toleran melalui pendidikannya dengan tujuan dan menitikberatkan pada pemahaman dan upaya untuk bisa hidup dalam konteks perbedaan faham agama dan budaya, baik secara individual maupun secara kelompok dan tidak terjebak pada primordialisme dan eksklusifisme kelompok agama dan budaya yang sempit, sehingga sikap-sikap pluralisme itu akan dapat

ditumbuhkembangkan dalam diri generasi muda Indonesia melalui dimensi-dimensi pendidikan agama. Di sinilah letak pentingnya pengembangan nilai-nilai multikultural dalam kurikulum pendidikan agama Islam (PAI).

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu: Sejauhmana nilai-nilai multikultural dapat dikembangkan dalam kurikulum Pendidikan Agama Islâm (PAI) pada Madrasah Aliyah ?

2. Batasan masalah

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, dan agar penelitian ini tetap fokus, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Kesesuaian nilai multikultural dengan nilai-nilai dalam ajaran Islâm
- b. Seberapa besar nilai-nilai multikultural terintegrasi dalam buku teks mata pelajaran Pendidikan Agama Islâm pada Madrasah Aliyah Negeri ?
- c. Nilai-nilai multikultural yang dapat dikembangkan dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islâm pada Madrasah Aliyah

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengelaborasi kesesuaian nilai-nilai multikultural dengan nilai-nilai dalam ajaran Islâm?
2. Untuk menganalisis nilai-nilai multikultural yang dapat dikembangkan dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islâm pada Madrasah Aliyah ?

3. Untuk menganalisis besarnya nilai-nilai multikultural terintegrasi dalam buku teks mata pelajaran Pendidikan Agama Islâm pada Madrasah Aliyah Negeri ?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan sebuah penelitian atau sebuah penulisan menurut Bakker dan Zuhair,⁴⁸ adalah upaya secara terus menerus memperbaharui kesimpulan dan teori yang telah diterima berdasarkan fakta-fakta dan kesimpulan yang telah ditemukan sehingga ilmu pengetahuan tidak menjadi stagnan. Suatu penulisan dan kajian menurut Kaelan,⁴⁹ harus memiliki nilai guna, baik secara praktis maupun akademis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dalam perspektif multikultural. Manfaat teoritis dapat berupa penambahan teori, pengembangan ide dan konsep-konsep dasar tentang kebutuhan pendidikan multikultural. Lebih lanjut hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan silabus yang lebih memperhatikan kebutuhan peserta didik, baik secara akademik maupun sosio-kultural. Sedangkan signifikansi praktis dari hasil penelitian ini adalah :

1. Dapat dijadikan pengetahuan oleh kalangan pendidik tentang cara mengembangkan ide dan konsep yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik menjadi sebuah silabus pembelajaran.

⁴⁸ Bakker, Anton dan Zuhair, *Metodologi Penulisan Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 11

⁴⁹ Kaelan, *Metode Penulisan Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 235.

2. Temuan penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan panduan/modular untuk memantau dan menilai kebutuhan akademik dan sosio-kultural peserta didik di sekolah yang relevan dengan nilai-nilai pendidikan multikultural.
3. Hasil penelitian ini bisa juga dipergunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian tentang pendidikan multikultural.
4. Secara khusus hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dan referensi teoritis-empiris bagi masyarakat dan pemerintah dalam mematangkan kebijakan yang terkait dengan sosialisasi dan penyiapan pendidikan multikultural di sekolah.